

Kerangka Acuan Pembuatan Film Akuntabilitas Sosial Pada Sektor Pertambangan Publish What You Pay Indonesia

Latar Belakang

Sektor ekstraktif memainkan peran penting sebagai motor penggerak pembangunan di Indonesia. Pendapatan pemerintah dari sektor ekstraktif telah meningkat hingga mencapai 28% dari total penerimaan pemerintah. Angka ini merepresentasikan lebih dari 50% total ekspor, 22% diantaranya dari sektor pertambangan. Dengan cadangan batu bara, emas, timah, dan nikel yang berlimpah, Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam rantai global industri pertambangan.

Mengingat dominasi dan pentingnya pertambangan dalam sektor ekstraktif, pemerintah telah mengadakan sejumlah reformasi demi meningkatkan pengelolaan serta akuntabilitas sumber daya mineral. Diantaranya, pelimpahan kewenangan pemberian dan pemantauan izin tambang ke pemerintah daerah guna mendekatkan proses pengambilan keputusan sumber daya mineral ke masyarakat. Juga pelaksanaan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) yang mulanya mendorong transparansi pendapatan negara dan kini telah berkembang ke rantai nilai yang lain seperti lingkungan, keterbukaan kontrak dan komoditas, serta aspek pengarusutamaan gender.

Sayangnya, sejumlah persoalan masih membayangi tata kelola pertambangan Indonesia. Aspek transparansi yang telah mengalami kemajuan masih membutuhkan perbaikan, sehingga publik luas – terutama masyarakat terdampak – dapat mengakses informasi penting terkait sektor pertambangan. Selain itu, mekanisme partisipasi, pengawasan publik dan akuntabilitas di sektor pertambangan mineral juga masih belum berjalan dengan baik. Ruang partisipasi masyarakat untuk ikut memantau aktivitas pertambangan terhambat oleh pengetahuan yang minim, akses data yang terbatas serta kurangnya wadah dan mekanisme pengaduan masyarakat dengan mekanisme penanganan yang memadai di daerah-daerah penghasil komoditas pertambangan.

Untuk menjawab persoalan di atas, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama sejumlah mitra menyelenggarakan proyek “Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan” yang didukung oleh *Global Partnership for Social Accountability* (GPSA) dan Bank Dunia. Proyek yang berlangsung sejak November 2020 ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen dan tata kelola sektor pertambangan di tingkat sub nasional melalui mekanisme akuntabilitas sosial yang kolaboratif, yakni menekankan pada partisipasi masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dari penyedia layanan dan pejabat publik di sektor pertambangan. Secara khusus, proyek ini bekerja di dua isu utama yakni perizinan dan manajemen pendapatan di sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Adapun proyek ini dilakukan di tiga provinsi terpilih, yaitu Aceh, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Secara garis besar, cakupan kegiatan dalam proyek ini meliputi peningkatan kapasitas (termasuk bagi masyarakat terdampak pertambangan), penyelenggaraan forum multi-pihak untuk memfasilitasi diskusi antara perwakilan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha,

serta penyelenggaraan *stakeholder scorecards* (instrumen partisipasi masyarakat untuk menilai penggunaan pendapatan daerah dari sektor pertambangan untuk pembangunan sosial di wilayahnya). Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas sistem perizinan dan manajemen pendapatan negara/daerah dari sektor pertambangan. Penekanan diberikan pada penyediaan informasi perizinan dan pendapatan dari sektor pertambangan yang mudah diakses masyarakat luas serta pemberdayaan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah setempat perihal pengelolaan sumber daya mineral dan pemanfaatan pendapatan melalui berbagai instrumen – forum multi-pihak dan *stakeholder scorecards*.

Untuk mendokumentasikan proses serta pembelajaran proyek tersebut, PWYP Indonesia atas dukungan dari GPSA - *The World Bank* mencari rumah produksi film yang berada di wilayah Indonesia sebagai mitra dalam pembuatan film. Ruang lingkup produksi atau jenis film berbentuk (namun tidak terbatas pada) semi-dokumenter dan dokumenter kreatif yang mengangkat persoalan pertambangan dan mengenalkan model akuntabilitas sosial¹ sebagai instrumen yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam mengurai persoalan tersebut.

Tujuan

Pembuatan film ini bertujuan sebagai dokumentasi pelaksanaan, capaian dan pembelajaran proyek, serta sebagai media kampanye kreatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (baik di kawasan *rural* maupun *urban*) akan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial dalam tata kelola pertambangan yang baik, sehingga terwujud pengelolaan pertambangan yang akuntabel dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup Pengerjaan Film

Tema Film

Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan

Lokasi Pembuatan Film

1. Kabupaten Nagan Raya, Aceh
2. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
3. Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
4. Kegiatan di tingkat nasional yang relevan

Topik Film

¹ Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan dalam <https://pwypindonesia.org/id/akuntabilitas-sosial-sektor-pertambangan/>

1. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pertambangan: bagaimana menyuarakan aspirasi, menyampaikan keluhan/saran, serta memperjuangkan hak-haknya
2. Pengetahuan dan pembelajaran masyarakat sekitar tambang
3. Kerja kolaboratif mengembangkan model akuntabilitas sosial lintas pemangku kepentingan

Komposisi Dasar Cerita

1. Penduduk di wilayah sekitar kegiatan pertambangan (mineral dan batubara) di tiga provinsi tempat berlangsungnya operasi pertambangan, serta pemangku kepentingan dan pejabat pemerintah daerah di sepanjang prosesnya.
2. Secara khusus, melihat cara masyarakat sekitar tambang dalam menyuarakan aspirasinya, berpartisipasi dan memperoleh manfaat atas proses pemberian izin usaha pertambangan, akses informasi dan proses dialog kebijakan dengan pemerintah dan pelaku usaha, mengenai pengelolaan pendapatan, serta upaya pengawasan publik terhadap kepatuhan perizinan (aspek sosial dan lingkungan) hingga manajemen pendapatan dan alokasi pengeluaran anggaran oleh pembuat kebijakan di tiap wilayah.
3. Peran para pemangku kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), akademisi, serta otoritas pemerintah yang relevan dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan akses informasi tentang perizinan pertambangan dan sistem pengelolaan pendapatan.

Daftar Pemangku Kepentingan Relevan

1. Masyarakat di sekitar area pertambangan
2. Kelompok perempuan
3. Masyarakat adat (komunitas adat)
4. Pemerintah desa
5. Pemerintah kabupaten
6. Pemerintah provinsi
7. Parlemen lokal
8. LSM/CSO/NGO lokal
9. Perusahaan pertambangan
10. Pemerintah pusat

Lingkup Kerja Rumah Produksi & Ketentuan lainnya

1. Bersama dengan PWYP Indonesia dan mitra proyek melakukan *brainstorming* isu, *angle*, cakupan pesan dan jenis film yang akan diproduksi
2. Menyusun isi dan alur cerita (*story board*) untuk dibahas dan disetujui oleh PWYP Indonesia
3. Melakukan pengambilan video, gambar, dan keperluan lainnya baik di lapangan maupun di lokasi lain yang diperlukan
4. Melakukan *editing* dan *finishing* film sesuai dengan konsep dan alur cerita yang telah disepakati, untuk kemudian dilakukan peninjauan dan revisi berdasarkan masukan-masukan

5. Hasil produk berupa 1 (satu) buah film berdurasi maksimal 30 menit dan *trailer* maksimal 2 menit yang dilengkapi dengan teks (*subtitle*) versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta 1 (satu) buah poster promosi film
6. Lama waktu pekerjaan dan kontrak maksimal selama 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan kualitas hasil
7. Metode pembayaran kontrak jasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian pada setiap tahapan pekerjaan (*milestone*) yang akan disepakati bersama pada saat pembahasan kontrak kerja sama
8. Jika dibutuhkan, rumah produksi dapat menggunakan bahan atau dokumentasi tambahan berupa gambar dan video milik PWYP Indonesia atau mitra program, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian konsep dan kualitas produk
9. Tidak diperkenankan menggunakan bahan atau dokumentasi dari sumber lain yang dapat mempengaruhi orisinalitas dan/atau melanggar hak cipta pihak lain
10. Hak cipta hasil produk berupa film dan *trailer* milik PWYP Indonesia. Rumah produksi dapat menggunakan film dan *trailer* untuk kebutuhan promosi, portofolio, atau pemutaran yang bersifat non komersial, atas izin dan persetujuan dari PWYP Indonesia dan pihak pendonor proyek. Lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dalam kontrak kerja sama.
11. Produksi film akan dipublikasi dalam 2 (dua) versi bahasa – Indonesia dan Inggris.
12. Standar komunikasi dan *branding* publikasi mengikuti ketentuan standar yang dimiliki oleh PWYP Indonesia dan program GPSA The World Bank, serta melalui konsultasi dengan tim Komunikasi Eksternal World Bank Jakarta.

Jadwal Produksi

Waktu	Kegiatan
Mei - Juni	
	Proses Rekrutmen Rumah Produksi dan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama
Juni - Juli	
I - III	Riset dan Pengembangan Cerita
IV	Finalisasi Ide Cerita
Agustus - September	
	Pengambilan & Penyuntingan Gambar
Oktober	
I - II	Presentasi <i>Picture Look I</i>
III - IV	Masukan dan Perbaikan
November	
I - II	<i>Music Scoring, Color Grading, Subtitling, dsb.</i>
III	Presentasi <i>Picture Look II</i>
IV	Finalisasi Hasil
Desember	
I	Pembuatan <i>Trailer & Poster</i>
II	Penyerahan Film, <i>Trailer</i> dan Poster
III-IV	Persiapan Peluncuran

Januari	
I - II	Pemutaran Perdana Film
II - IV	Pemutaran Film untuk Publik

Nilai Jasa Produksi

Nilai kontrak jasa produksi film adalah maksimal Rp 250 juta (termasuk pajak). Nilai jasa ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sepanjang proses pembuatan film, termasuk pengambilan gambar di lapangan serta pelibatan *talent* atau pihak lainnya.

Mekanisme Pengajuan Penawaran

1. Pihak yang tertarik dengan kerjasama ini dapat mengirimkan Surat Penawaran yang minimal berisi profil Rumah Produksi/*company profile*, tawaran konsep/draf kasar, gambaran tahapan dan jadwal kegiatan (*timeline*), serta rencana penggunaan anggaran. Selain itu, diharapkan juga untuk mengirimkan CV tim kerja yang akan terlibat serta portofolio karya (termasuk film serupa yang pernah dibuat – bisa mencantumkan *link*).
2. Surat penawaran ditujukan ke email: procurement@pwypindonesia.org dengan Subyek: Pembuatan Film GPSA_[Nama PH/Company]. Dokumen diterima paling lambat 24 Mei 2021.
3. PWYP Indonesia hanya akan menghubungi kandidat Rumah Produksi yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti proses seleksi tindak lanjut.

Tahapan dan Jadwal Rekrutmen

Tanggal	Kegiatan
5 Mei 2021	<i>Request for Quotation (RFQ)</i>
10 Mei 2021	<i>Invitation To Providers (Production House)/ Announcement in the website & others</i>
	<i>Amendments to RFQ (if any)</i>
10 – 24 Mei 2021	<i>Receive Quotations (15 days)</i>
27 Mei - 7 Juni 2021	<i>Comparison of Quotations & Interview (the shortlist candidate)</i>
8 – 13 Juni 2021	<i>Standstill (Negosiasi) & Debriefing / Tanya Jawab (5 days)</i>
14 Juni 2021	<i>Notification of Award</i>
15 – 20 Juni 2021	<i>Masa Sanggahan (5 days)</i>
21 Juni 2021	<i>Signed Contract</i>
15 Desember 2021	<i>Contract Completion</i>